

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Sution Usman et.al, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, PT. Rinka Cipta , Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1988 , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1994, *Hukum Administrasi Indonesia*, cet.10, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. Hamid 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Bahari, Adib, 2010, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, cet. 1, Yustisia, Yogyakarta.
- Basah, Sjahran, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Doludjawa, Linus, 2005, *Buku pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.
- Farida, , Indrati S. Maria 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- _____, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus, et.al, 2001, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ilmar, Aminudin 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2006, *General Theory of Law and State, (teori Umum tentang Negara dan Hukum)*, penerjemah Raisul Multaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung.

Lawalata, Herman A. Carel, *Konosemen dan Forwarding Agency (Eksepedisi Muatan Kapal Laut dan Pengepakan)*, 1978, Aksara Baru. Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cet. IV. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustafa, Bachsan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

Nugraha, Safri, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.

Purba, Hasim, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Prasetya, Rudhi, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Prasetyo, Heru, 2016, *Kompilasi Ringkasan Konvensi Internasional Bidang Transportasi*, Jakarta.

Siregar, Hasnil Basri, 1995, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang EMKL dan JPT*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan.

Soedjono, Wiwoho, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, 1983, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Soemitro, Rochmat 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas, dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung, PT. Eresco.

Sutedi, Adrian, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyono, R.P, 2007, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor melalui Laut*, PPM, Jakarta.

Utrecht, E, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, 2009, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 32)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 555) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1535)

C. Artikel Internet

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 4 April 2017

<http://www.fiata.com>, diakses pada tanggal 3 April 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ac8a8c7c96e/fungsi-aturan-peralihan-dan-aturan-tambahan>, diakses pada tanggal 3 Mei 2017

<http://www.imf.org>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017

<http://kbbi.web.id/alih>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017

<http://news.liputan6.com/read/2636805/efisiensi-aturan-kemenkumham-segera-reformasi-undang-undang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017

D. Hasil Penelitian

PT. Properindo Jasatama, 2014, Laporan Akhir Studi Kebijakan Pembinaan Perusahaan di bidang Multimoda dalam rangka menghadapi Persaingan Internasional, Badan Litbang Perhubungan, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara RI, 1994, *Sistem Administrasi Negara RI Jilid II*, CV Haji Masagung, Jakarta.

E. Dokumen lainnya

United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods

Manual on Freight Forwarding 1st Edition 1990 UN ESCAP